

## Proyek Dua Gedung Pemerintahan Dilanjutkan Kucurkan Anggaran Rp15 Miliaran



Sumber gambar : [Kaltimpost.co.id](http://Kaltimpost.co.id) Senin, 05/2/2024

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang memastikan dua gedung akan dilanjutkan pembangunannya tahun ini. Melalui depo arsip dan Kantor Satpol PP.

**BONTANG** – Kepala Dinas PUPRK Usman mengatakan keduanya masuk dalam APBD 2024.

“Jadi dua gedung itu pembangunannya akan rampung di akhir tahun,” kata Usman.

Khusus untuk lanjutan pembangunan depo arsip, Pemkot mengucurkan anggaran senilai Rp10,7 miliar. Sebelumnya, pembangunan hanya menasar konstruksi lantai dasar dan satu. Pada 2022 lalu, anggaran yang digelontorkan Rp3,1 miliar.

“Pada tahun ini, ditargetkan seluruh pengerjaan selesai hingga lantai dua. Karena sesuai rencana ada tiga lantai untuk depo arsip,” ucapnya.

Ia mengaku untuk lanskap tidak ada. Saat ini proses lelang sudah mulai diajukan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Bahkan, pengawasan teknis pun sudah mulai ditenderkan. Dengan penganggaran Rp805 juta. Diketahui, kebutuhan untuk depo arsip sangat mendesak. Pasalnya, jumlah arsip terus bertambah tiap waktunya.

Sementara, ruangan sebelumnya telah mencapai kelebihan kapasitas. Sesuai *detail engineering design* (DED)<sup>i</sup>, depo arsip akan diperuntukkan menyimpan beragam arsip. Mulai dari *display* arsip, diorama, koleksi arsip vital, serta arsip lainnya yang jadwal retensi arsipnya diatas 10 tahun.

Saat ini, di ruang arsip yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Bontang, telah menyimpan lebih dari 15 ribu arsip *statis bialk* berupa foto, video, maupun dokumen lainnya yang memiliki nilai sejarah.

Sejatinya, taksiran awal pembangunan ini senilai Rp11 miliar. Namun, mengalami lonjakan dikarenakan menyesuaikan harga material yang terus merangkak naik.

Pembangunan Kantor Satpol PP juga dilanjutkan setelah 2022 dilakukan tahap awal. Kali ini, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp4,5 miliar. Nantinya pembangunan akan merampungkan konstruksi gedung di lantai dasar. Dengan tujuan bangunan ini segera dipakai. Mengingat saat ini Satpol PP harus menyewa bangunan di Kompleks Perum Halal Square.

Sebelumnya, Pemkot telah merogoh kocek sejumlah Rp5,9 miliar untuk pembangunan gedung ini. Pembangunan akses jalan sudah dikerjakan pada tahun lalu. Anggaran Rp199 juta. Luasan area kawasan baru ini, yakni 3.338 meter persegi. Sebagai informasi biaya sewa untuk kantor sementara tercatat Rp400 juta.

"Kedua pembangunan ini memang masuk skala prioritas," jelasnya. **(ak/far/k15)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Proyek Dua Gedung Pemerintahan Dilanjutkan Kucurkan Anggaran Rp15 Miliaran, 05/02/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk kepentingan penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, ANRI dapat membentuk depot dan/atau tempat penyimpanan arsip inaktif yang berfungsi sebagai penyimpan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan.
2. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Permen PUPR 22/2018) dijelaskan bahwa bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
3. Dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) Permen PUPR 22/2018 bahwa pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara meliputi:
  - a. komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara;
  - b. biaya standar dan biaya nonstandar;
  - c. standar harga satuan tertinggi;
  - d. biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pembangunan; dan
  - e. biaya pembangunan dalam rangka perawatan.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://www.siputra.tulungagung.go.id/page/pelayanan-verifikasi-gambar-detail-engineering-design-ded>, Rancang Bangun Rinci (*Detail Engineering Design*) yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.